

Mei 2012, Th. XXXI, Edisi Khusus Dies Natalis UNY

NOMOR ISSN : 0216 - 1370

CAKRAWALA PENDIDIKAN

JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN



PENERBIT
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPPMP)
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

CAKRAWALA PENDIDIKAN

Jurnal Ilmiah Pendidikan

Penerbit:

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP)
Universitas Negeri Yogyakarta

Redaksi

Ketua : Prof. Pardjono, Ph.D.
Sekretaris : Sri Sumardiningsih, M.Si.
Anggota : Prof. Slamet P.H, Ph.D.
Prof. Darmiyati Zuhdi, Ed.D.
Prof. Dr. Burhan Nurgiyantoro
Prof. Dr. Husaini Usman
Prof. Dr. Abdul Gafur
Prof. Wawan S. Suherman, M.Ed.
Prof. Dr. Mundilarto
Prof. Dr. Sukadiyanto
Sumarno, Ph.D.
Dr. Slamet Suyanto
Losina Purnastuti, Ph.D.

Redaktur Penyelia : Dr. Kastam Syamsi
Dr. Agus Widyantoro

Desain Sampul : Martono, M.Pd.

Sekretariat : Dra. Sri Ningsih
Sri Ayati, S.Pd.
Ganjar Triyono, S.Pd.
Mardiasih, A.Md.

Alamat Redaksi: LPPMP Universitas Negeri Yogyakarta, Karangmalang,
Yogyakarta, 55281, Telp. (0274) 586168 psw. 233; (0274) 550852;
Fax. (0274) 550838, e-mail: lppmp@uny.ac.id.

Tulisan yang dimuat di *Cakrawala Pendidikan* belum tentu merupakan cerminan sikap dan atau pendapat
Penyunting Pelaksana, Penyunting, dan Penyunting Ahli. Tanggung jawab terhadap isi
dan atau akibat dari tulisan, tetap terletak pada penulis

Nomor ISSN: 0216-1370

CAKRAWALA PENDIDIKAN
Jurnal Ilmiah Pendidikan
Mei 2012, Th. XXXI, Edisi Khusus Dies Natalis UNY

Berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor: 110/Dikti/Kep/2009, tanggal 5 Desember 2009 tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Cakrawala Pendidikan* dinyatakan terakreditasi sebagai Jurnal Ilmiah Nasional sampai dengan Desember 2012

PENERBIT
Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP)
Universitas Negeri Yogyakarta

CAKRAWALA PENDIDIKAN
Jurnal Ilmiah Pendidikan
Mei 2012, Th. XXXI, Edisi Khusus Dies Natalis UNY

Daftar Isi	iii
1. Pengembangan Model Penilaian Otentik Penjasorkes Materi Permainan Invasi Bolabasket di Sekolah Dasar <i>Tomoliyus</i>	1-10
2. Pendidikan Nilai Holistik untuk Membangun Karakter Anak di SDIT Alam Nurul Islam Yogyakarta <i>Rukiyati</i>	11-22
3. Pengembangan Bahan Ajar Seni Musik Berbasis Pembelajaran Kontekstual <i>Ardipal</i>	23-36
4. Pendidikan Khusus pada Awal Menuju Inklusi (Sebuah Refleksi Historis di Jawa) <i>Mumpuniarti</i>	37-52
5. Implementasi Manajemen Strategik Berbasis Kemitraan dalam Meningkatkan Mutu SMK <i>Zainal Arifin</i>	53-65
6. Evaluasi Program Pembinaan Cabang Olahraga Karate di Daerah Istimewa Yogyakarta <i>Sugeng Purwanto</i>	65-77
7. Pengembangan Tes Diagnostik Bahasa Prancis melalui Analisis Kesalahan Berbahasa <i>Dwiyanto Djoko Pranowo</i>	78-97
8. Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia <i>Sunarso, Sodik Azis Kuntoro, dan Abdul Gafur</i>	98-112
9. Model Unit Produksi SMK: Studi Kasus di SMKN 2 Pengasih Kulon Progo Yogyakarta <i>Tawardjono Us.</i>	113-124
10. Dinamika Struktur dan Kultur dalam Penerapan Desentralisasi Pendidikan <i>Siti Irene Astuti D.</i>	125-141
11. Dilema Pendidikan Politik sebagai Basis Transformasi Gerakan .. <i>Nasiwan</i>	142-156

**PENDIDIKAN KHUSUS PADA AWAL MENUJU INKLUSI
(SEBUAH REFLEKSI HISTORIS DI JAWA)**

Mumpuniarti

FIP Universitas Negeri Yogyakarta (email: nmumpuniarti@yahoo.com)

Abstrak: Pendidikan Khusus pada Awal Menuju Inklusi (Sebuah Refleksi Historis di Jawa). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan pendidikan khusus pada program wajib belajar 6 tahun, untuk mengetahui landasan perubahan pendidikan khusus dari yang bersifat eksklusif ke inklusif, dan mengungkap filsafat pendidikan yang melandasi perubahan pada pendidikan khusus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan khusus pada wajib belajar 6 tahun menandai permulaan program inklusi, yang dimulai dari program inklusi bagi siswa tuna netra. Program inklusi juga diberikan kepada anak-anak yang superior dan anak-anak yang memiliki kesulitan belajar spesifik atau disfungsi minimal otak/DMO. Perubahan pendidikan khusus tersebut didasari oleh pandangan humanism yang berakar dari filosofi pragmatisme dan eksistensialisme.

Kata Kunci: *pendidikan khusus, refleksi historis, inklusi*

Abstract: Special Education at the Beginning of the Inclusion Program (A Historical Reflection in Java). This study aimed to describe the development of special education on the 6-year compulsory education program, to find out the educational basis in the change of special education from being exclusive to being inclusive, and to reveal the educational philosophy underlying the change in special education. This study employed the qualitative approach with the historical approach. The findings showed that the development of the special education on the 6-year compulsory educational program marked the beginning of the inclusion program, starting with the inclusion program for the blind. This inclusion program was also provided for superior children and for those with specific learning difficulties or Minimal Brain Dysfunction. The change in the special education was based on the humanistic view which originated from the philosophy of pragmatism and existentialism.

Keywords: *special education, history reflection, to inclusive*

PENDAHULUAN

Pendidikan khusus pada awal perkembangan dirintis oleh seorang dokter bernama Jean-Marc-Gaspard Itard dari Perancis. Rintisannya dimulai tahun 1800 Masehi ketika dokter Itard menemukan seorang anak di hutan. Anak tersebut diasuh oleh serigala sehingga perilakunya seperti serigala. Anak tersebut kemudian dinamai Victor dan oleh Itard dididik agar perilakunya seperti layaknya manusia. Victor dididik oleh Itard dengan ide program khusus berupa latihan mengaktifkan indera. Program khusus itu merupakan pertanda awal adanya pendidikan khusus. Ide tersebut dilanjutkan oleh Seguin salah seorang dari murid Itard. Seguin menghasilkan ide tentang metode fisiologik. Perintis lainnya yang kemudian bermunculan adalah Montessori dari Italia yang terkenal dengan penciptaan alat-alat edukatif untuk menstimulasi perkembangan anak. Tokoh berikutnya Decroly dari Belgia yang menyempurnakan ide Seguin dan Montessori. Ide-ide para tokoh tersebut merupakan program khusus bagi mereka yang mengalami kecacatan atau kelainan.

Program khusus disebut juga program kompensatoris karena program itu bertujuan mengganti berbagai kelemahan atau hambatan yang dimiliki oleh anak atau seseorang yang cacat/kelainan. Program itu juga disebut program khusus karena memiliki tujuan, materi, metode, dan strategi yang dilakukan secara spesifik. Program itu disediakan bervariasi sesuai dengan kelainan dan hambatan yang ada pada seseorang. Program tersebut antara la-

in: pengembangan komunikasi dan bahasa bagi anak yang mengalami hambatan bicara dan komunikasi, pengembangan orientasi dan mobilitas bagi anak yang mengalami hambatan sensori dan mobilitas, pengembangan kemampuan aktivitas kehidupan sehari-hari dan mengurus diri sendiri bagi yang memiliki hambatan mental berat, pengembangan bina perilaku dan sosial bagi anak-anak yang problem tingkah laku, dan berbagai terapi yang bersifat medis maupun nonmedis. Di samping itu, program kompensatoris berupa program pengembangan kemampuan-kemampuan yang unik dan istimewa di antara anak-anak khusus dengan membina seoptimal mungkin. Pembinaan yang tepat justru menjadi kemampuan yang luar biasa untuk menutup kelemahan akibat kecacatan yang dialami oleh anak khusus.

Permasalahan yang muncul bahwa perubahan di bidang pendidikan khusus dengan menuju inklusi di saat sekarang 'masihkah' mengakomodasi kebutuhan mendasar dari penyandang cacat/berkebutuhan khusus. Program kompensatoris sebagai kekhasan pendidikan khusus lebih dapat diakomodir dengan bentuk layanan lembaga khusus atau dalam bentuk inklusif juga dapat dilayani. Selanjutnya, landasan pendidikan khusus di masa lalu 'masihkah' mampu dipertahankan untuk landasan pendidikan khusus saat sekarang, maupun di masa yang akan datang.

Pengkajian pendidikan bagi penyandang cacat/kelainan ialah praksis ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan merupakan konsep tentang proses-menjadi-ma-

nesia di dalam habitus kemanusiaan. Hal itu sesuai pernyataan Tilaar (2005: 110) bahwa pendidikan proses-menjadi-manusia dalam habitus kemanusiaan. Pengkajian tersebut memerlukan dukungan ilmu-ilmu lainnya sehingga Barnadib (2002:41-42) bahwa ilmu pendidikan sebagai ilmu yang multidisiplin. Pengamatan terhadap ilmu pendidikan yang dilakukan dengan cermat akan tampak jelas bahwa terdapat faktor-faktor, seperti peserta didik, pendidik, cita-cita dan tujuan pendidikan, lingkungan, serta alat-alat pendidikan. Faktor-faktor itu secara implisit menunjukkan bahwa ilmu pendidikan memerlukan berbagai fondasi. Hal yang terkait cita-cita dan tujuan pendidikan perlu landasan filosofis menjadi kajian filsafat pendidikan. Fondasi psikologis yang mengkaji peserta didik menjadi psikologi pendidikan, lingkungan habitus masyarakatnya perlu fondasi sosiologis yang menjadi sosiologi pendidikan, serta masyarakat memiliki budaya diperlukan fondasi budaya sehingga perlu pengkajian tentang sosio-kultural. Fondasi-fondasi yang diikuti oleh penyelenggaraan atau dalam praktik pelaksanaan pendidikan akan terlihat pada prinsip-prinsip yang digunakan.

Barnadib (1982:12) mengemukakan bahwa landasan atau prinsip merupakan penuntun (*guiding principles*) tentang pendidikan harus dilaksanakan dan dinilai. Pengkajian tentang pendidikan secara historis untuk menemukan landasan dan prinsip dari praktik pendidikan di masa lampau. Pemikiran tentang praktik memberi kontribusi kepada pemikiran sistem. Refleksi terhadap sistem mempertanyakan esensinya,

jawaban terhadap esensi diperlukan dasar-dasar kefilosofatan. Perjalanan proses itu memerlukan berbagai perenungan bahwa pendidikan dalam kerjanya membangun sebuah keilmuan diperlukan berbagai landasan atau dasar. Dasar tersebut mengandung berbagai maksud yang perlu dilaksanakan melalui pendidikan.

Pengkajian tentang historis dalam pendidikan khusus sebagai pijakan untuk keberlangsungan pendidikan khusus. Kajian historis adalah cerita yang berlangsung di balik arus waktu dan di belakang aneka corak kehidupan dikemukakan Cassirer (1990:261) berharap bisa menggali ciri-ciri konstan kodrat manusia. Lebih lanjut ditegaskan oleh Burckhardt dalam *Thoughts on World History* (Cassirer, 1990:261) upaya untuk mengetahui dengan pasti unsur-unsur konstan yang selalu berulang dan tipikal. Tugas dari kajian historis dalam ilmu pendidikan dikemukakan Barnadib (1982:12-13) mengungkap pendidikan yang dilakukan di masa lampau yang mengandung gagasan tertentu. Gagasan itu menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan sistematis. Gagasan yang diungkap termasuk landasan yang digunakan.

Salah satu landasan yang digunakan dalam ilmu pendidikan adalah landasan filosofis. Landasan itu memberi pandangan tentang realitas pendidikan. Pandangan tersebut dinyatakan Gutek (1974: 8-9) dapat dikelompokkan dalam pernyataan sebagai berikut. Idealisme, Realisme, dan Thomisme adalah tiga filsafat pendidikan yang utama dalam peradaban Barat yang memiliki sejarah panjang. Ketiga filsafat itu adalah yang

mendasari arah proses pendidikan maupun bentuk dari rancangan kurikulum. Berhubungan secara erat dengan ketiga filsafat tradisional itu adalah teori pendidikan perenialisme yang menekankan karakter rasio manusia, dan esensialisme yang menekankan pendidikan yang mendasar.

Berlawanan dengan filsafat yang lebih tradisional adalah filsafat eksperimentalis-pragmatis yang dikemukakan oleh John Dewey's yang menekankan bahwa proses pendidikan sebagai transaksi antara manusia dan lingkungan. Beberapa teori pendidikan yang berhubungan dengan filsafat eksperimentalisme adalah pogramisisme dan rekonstruksionisme. Progresivisme dimulai sebagai reaksi perlawanan terhadap paham pendidikan yang tradisional, dan progresivisme menekankan kebebasan yang berpusat pada minat dan kebutuhan anak. Rekonstruksionisme mengutamakan peranan sekolah secara signifikan untuk kritisme budaya dan perubahan.

Pandangan filosofis yang berpengaruh terhadap pendidikan khusus tergantung perkembangan pendidikan khusus saat berlangsung. Perkembangan itu juga tergantung dalam konteks zaman perkembangan pendidikan. Asumsi ini atas dasar bahwa perkembangan filsafat yang tradisional juga berpengaruh saat masih berlangsung zaman tradisional, sedang saat zaman sesudahnya timbul pragmatisme, dan eksistensialisme, yang kemudian berkembang progresivisme dan humanisme juga turut memengaruhi terhadap perspektif dalam pendidikan khusus.

Lynch (Budyanto, 2006:62) mengemukakan tujuh prinsip agar terwujud *Universal Primary Education*(UPE). Salah satu di antaranya tentang "Komitmen terhadap Filsafat Pendidikan yang berpusat pada anak (*child-centered*)". Prinsip itu menunjukkan filosofi yang diadun sesuai filsafat dalam progresivisme. Hal itu juga sesuai konteks budaya munculnya *paradigma inklusif*, yakni fenomena multikulturalisme, hak azasi, dan demokrasi. Fenomena itu mendorong iklim pendidikan di sekolah menghargai keberagaman peserta-didik. Penghargaan itu sebagai wujud menghargai potensi anak dengan segala keunikannya masing-masing. Fenomena pendidikan khusus menuju inklusi sesuai dengan fenomena di bidang ilmu sosial dan pendidikan tentang pandangan Post-modern. Tilaar (2005:36-41) mengemukakan bahwa postmo adalah paham reaksi terhadap modernisme. Paham itu bersifat "*open-ended*" yang lebih mengutamakan fleksibilitas dan interdisipliner. Hal itu sebagai paham menghargai akan keberagaman dalam kehidupan. Penghargaan itu berimplikasi menghargai keberpusatan pada anak.

Filosofi yang berpusat pada anak dalam paradigma inklusif lebih berorientasi humanis. Menurut Knight (1982:86), "*The humanists have adopted most of the progressive principles including child-centeredness, the non-authoritative role of the teacher, the focus on the active and involved pupil, and the cooperative and democratic of education*". Maksudnya, sifat humanis kebanyakan diadopsi dari prinsip-prinsip progresif termasuk keberpusatan pada anak, peranan guru yang tidak autoritatif, fokus keaktifan

dan keterlibatan siswa, dan mengandung aspek pendidikan yang kooperatif dan demokrasi. Demikian juga Knight (1982:87) mengatakan bahwa fokus pendidikan yang berpandangan humanis terletak pada membantu siswa menjadi "humanized" atau "self-actualized". Jadi, memanusiakan dan mengaktualisasikan seluruh kepribadian siswa merupakan fokus pendidikan yang berpandangan humanis. Tujuan yang dicapai bagi siswa dalam pandangan pendidikan yang humanis adalah "self-actualization rather than a mastery of knowledge as an end in itself" (Knight, 1982:88). Maksudnya, tujuan yang diutamakan dalam pendidikan yang berpandangan yang humanis adalah aktualisasi diri kepribadian siswa dari pada ketuntasan pengetahuan dalam membentuk akhir pribadi siswa. Dengan demikian, paradigma inklusif dalam pendidikan khusus yang bermaksud agar peserta-didik yang menyandang cacat/berkebutuhan khusus berkembang seluasnya sebagai pribadi yang menyeluruh adalah berpandangan filosofi yang humanis sebagai orientasi teori.

Pengkajian terhadap sejarah juga meninjau tentang gerak peradaban manusia atas dasar keyakinan yang dipegang, demikian juga peradaban tentang pendidikan. Pandangan berikutnya dikemukakan Abdulgani (Barnadib, 1982: 25-26) bahwa ada tiga aliran atau konsepsi penglihatan sejarah. *Pertama*, memandang bahwa seluruh kejadian dalam sejarah merupakan kejadian yang berulang dari kejadian-kejadian dahulu, seperti halnya teori siklus. *Kedua*, mendasarkan pada pandangan filosofis penebusan. Pandangan segala kejadian

dalam sejarah ditafsirkan semata-mata sebagai kehendak Tuhan. Manusia dalam sejarah menjalankan perannya untuk menebus dosa. *Ketiga*, bahwa sejarah kemanusiaan terdapat suatu garis yang menaik, meningkat, dan menuju ke arah kemajuan dan kesempurnaan (*progressif*). Pandangan progressif ini tetap meyakini hal-hal masa yang lampau selalu berulang, tetapi ulangan berikutnya ke arah meningkat lebih tinggi dan maju. Pandangan ini mendorong manusia untuk selalu menyempurnakan, meningkatkan semangat perbaikan di berbagai bidang.

Pengkajian tentang pendidikan khusus menyangkut dua hal, yaitu siapa yang dimaksud siswa yang harus menerima pendidikan khusus dan mengapa harus menerima pendidikan khusus. Menurut Hallahan & Kauffman (2003:7): "*Two concepts are important to our educational definition of exceptional learners: (1) diversity of characteristics and (2) need for special education. The concept of diversity is inherent the definition of exceptionality; the need for special education is inherent in an educational definition*". Maksudnya ada dua konsep utama untuk memberi batasan pendidikan bagi anak berkelainan, yaitu: (1) karakteristik perbedaan; dan (2) kebutuhan akan pendidikan khusus. Dua konsep tersebut sudah melekat pada batasan siswa berkelainan dan batasan pendidikan. Dua konsep itu sudah merupakan hubungan kausal, yaitu karena berkelainan perlu atau memiliki kebutuhan pendidikan khusus. Jadi, definisi pendidikan khusus yang dikemukakan oleh Hallahan & Kauffman (2003:13) adalah sebagai berikut "*Special education means*

pecially designed instruction that meets the unusual needs of an exceptional student." Makna pendidikan khusus merupakan pengajaran yang dirancang atau didisain secara khusus untuk memenuhi kebutuhan yang tidak biasa/umum dari siswa berkelainan.

Bentuk-bentuk penyelenggaraan layanan pendidikan bagi yang dipandang cacat (*disabilities*) yang bervariasi. Layanan yang dimulai dengan *segregasi*, *mainstreaming*, *integrasi*, dan *inklusi*. *Segregasi* adalah bentuk penyelenggaraan terpisah dari sekolah umum; *mainstreaming* dengan bentuk penyelenggaraan bersama-sama di sekolah umum, tetapi pada layanan khusus para siswa berkebutuhan khusus masuk ruang khusus atau ruang sumber; *integrasi* adalah siswa berkebutuhan khusus belajar bersama dengan siswa umum di sekolah umum dan sewaktu belajar dengan bantuan guru pembimbing khusus; *inklusi* merupakan integrasi penuh dari berbagai kondisi kecacatan, kelainan, atau berkebutuhan khusus yang dilayani di sekolah biasa dan guru harus melayani dengan memodifikasi sesuai kebutuhan anak dan harus mampu mengkolaborasi berbagai kondisi dari siswa yang dilayani. Masing-masing bentuk layanan tersebut muncul dan berkembang dikarenakan berbagai persoalan yang menjadi kecenderungan dalam pendidikan khusus.

METODE

Pendekatan penelitian secara kualitatif dengan menggunakan metode sejarah. Metode sejarah dipilih dalam penelitian ini karena untuk mengungkap penyelenggaraan pendidikan khusus di

masa lalu. Masa lalu difokuskan pada dua periode, yaitu periode sesudah Indonesia merdeka sampai munculnya gerakan wajib belajar enam tahun, dan periode mulai gerakan munculnya gerakan wajib belajar enam tahun sampai dirintisnya pendidikan inklusi sekitar tahun 1990. Mengungkap peristiwa-peristiwa pendidikan di masa lalu atau saat dua periode tersebut diperlukan penulisan sejarah. Menurut Sjamsudin (2007:9), seperangkat pernyataan tentang peristiwa-peristiwa masa lalu disebut *historiografi*. Proses mewujudkan "*historiografi* dalam bidang pendidikan khusus" diperlukan metode sejarah.

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan tahapan berikut. (1) Tahap pengumpulan sumber (*heuristik*) di Perpustakaan Nasional, Perpustakaan empat perguruan tinggi, perpustakaan Yayasan 'Asih Budi', serta sumber personal dari orang-orang pelaku atau pemerhati pendidikan khusus yang telah berpengalaman di antara tahun 1950 sampai 1990. (2) Tahap pengategorian sumber dan kritik sumber. Pada tahap ini menilai kategori sumber yang original sebagai sumber primer dan kategori sumber turunan atau tidak langsung sebagai sumber sekunder, sedangkan kritik sumber dievaluasi secara eksternal dari otentitas dan secara internal pada kebenaran sumber. (3) Tahap penafsiran dan penyajian: penafsiran sebagai tahap analisis dan penyajian sebagai tahap sintesis. Analisis berdasarkan konteks peristiwa yang mengikuti dan pemahaman dengan rujukan inferensi teori yang dikaji, serta sintesis menggunakan kronologi, kausalitas, serta pokok persoalan.

HASIL

Wajib belajar enam tahun bagi semua anak usia sekolah sebagai gerakan pendidikan di Indonesia yang dicanangkan di tahun 1984 diperuntukkan juga bagi anak yang menyandang cacat atau kelainan. Melihat kondisi geografis wilayah Indonesia tidak memungkinkan bahwa setiap satu sekolah khusus yang didirikan di daerah kecamatan hanya menampung satu jenis kecacatan. Kondisi itu jika diberlakukan akan terjadi pemborosan karena satu sekolah mungkin hanya ada lima siswa. Demikian juga jika pendidikan khusus dalam memperluas cakupan layanan kepada anak yang berkebutuhan khusus lainnya yang tidak dikonstruksi oleh Departemen sosial perlu adanya kesempatan berintegrasi atau sekolah terpadu di sekolah umum. Persoalan ini dapat kita cermati pada beberapa pokok pikiran dari Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dimuat di majalah *Analisis Pendidikan* yang diterbitkan tahun 1981 berikut ini.

“Sambutan Menteri pendidikan dan Kebudayaan pada Seminar Nasional Pendidikan Luar Biasa di Jakarta, Tanggal 15 September 1982

Undang-undang Dasar 1945, Pasal 31, Ayat 1, mengatakan: “Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapat pendidikan.” Perkataan “tiap-tiap” ini berarti bahwa pendidikan harus meliputi, harus dapat menjangkau semua warga negara, termasuk anak luar biasa atau berkelainan, yaitu mereka yang mempunyai kelainan/penyimpangan dalam segi jasmani, keindraan, rohani, intelektual, sosial dan emosi atau gabungan dari segi-segi kelainan tersebut, sehingga untuk mencapai perkembangan kapasitas yang maksimum dan wajar diperlukan pel-

ayanan pendidikan khusus di dalam lingkungan yang sedapat mungkin tidak terbatas.

....

Harus diakui bahwa yang sudah dilaksanakan masih belum memuaskan, karenanya masih perlu disempurnakan, baik yang mengenai konsep, pola, metode, dan peralatan pendidikan, maupun formasi dan mutu tenaga kependidikan, serta struktur organisatoris badan yang memikirkan dan melaksanakan PLB ini. Di samping ini, masih ada kelalaian yang belum terlayani sama sekali, seperti pendidikan bagi anak yang berpenyakit kronis dan bagi anak yang sangat cerdas (*gifted children*). Tidak adanya pendidikan khusus untuk anak-anak yang luar biasa cerdasnya berarti kita menyalahgunakan anugerah alam berupa bibit-unggul bagi perkembangan Negara-Bangsa kita yang lebih pesat dari normal di bidang-bidang kemampuan atau keahlian tertentu.

....

Usaha penyempurnaan dilakukan melalui serangkaian penelitian. Pengembangan penelitian PLB ini bertitik-tolak dari kegiatan yang didasarkan pada Pola Dasar Umum Penyelenggaraan PLB dalam rangka kewajiban belajar yang telah disusun oleh Kelompok Kerja PLB Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (BP3K) dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pengembangan dan Penelitian PLB mencakup tiga kategori usaha pokok, yaitu, (i) dalam rangka pengembangan, uji coba Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dalam rangka pemerataan pendidikan, berdasarkan pendekatan kemasyarakatan, (ii) pemantapan pendidikan terpadu anak tunanetra bekerja sama dengan Helen Keller Internasional, yang perjanjian kerja samanya ditandatangani pada tanggal 8 September 1977. Dalam rangka ini, telah ditatar 33 orang guru tamatan

SGPLB untuk menjadi guru pendidikan terpadu dan telah ditatar pula 27 orang guru dalam bidang orientasi dan mobilitas (berjalan dengan tongkat) dan penggunaan 20 SD di Bandung dan 13 di Yogyakarta bagi pendidikan terpadu ini, dan (iii) penelitian yang mencakup test bagi anak tunanetra, survei identifikasi anak berbakat, petunjuk sederhana pendataan dan persiapan pola dasar umum setiap ketunaan (A s/d E)." (Sumber: *Analisis Pendidikan*, Tahun II-Nomor 1-1981, diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan).

Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut adalah sebagai suatu pertanda perlunya dipikirkan anak-anak berkebutuhan khusus lainnya, yaitu anak-anak yang berkemampuan unggul dan anak yang memiliki penyakit kronis. Pendidikan khusus untuk merespon hal itu seharusnya memperluas cakupan layanan dan dimulainya pendidikan khusus yang terintegrasi di sekolah umum. Perlu integrasi di sekolah umum karena mereka yang belum terlayani pendidikan khusus bukan anak-anak yang observable kekhususanannya. Sekolah khusus bagi mereka juga akan merugikan bagi anak tersebut karena label yang ada pada sekolah khusus merugikan kelanjutan studi atau kehidupan mereka. Untuk itu, pilihan yang dipandang tepat adanya rintisan uji coba sekolah terpadu dan kemungkinan juga melayani terpadu bagi anak-anak berkemampuan unggul, memiliki penyakit kronis, serta masalah belajar dan perilaku ringan. Demikian juga, pemerataan pendidikan bagi yang sudah kategori dikonstruksi Departemen Sosial di wilayah yang belum ada sekolah khusus. Sekolah khusus untuk

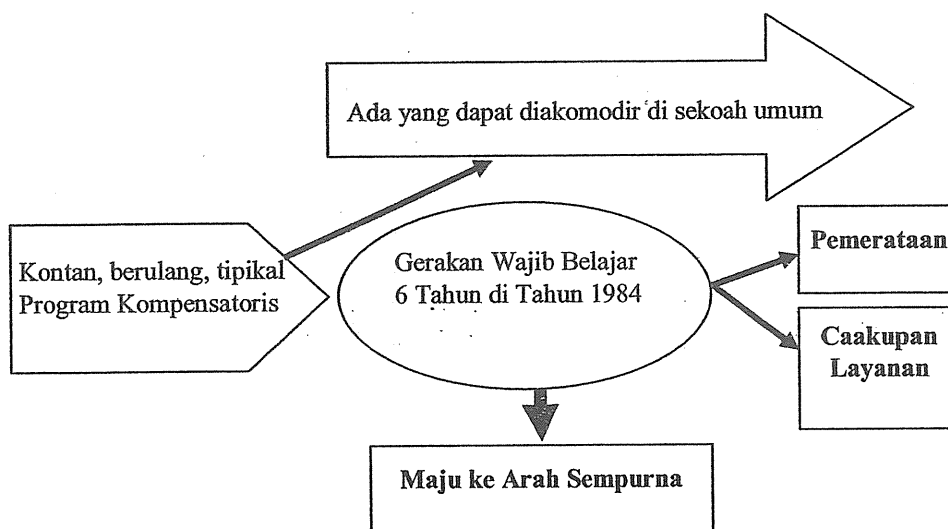
mereka dirancang dalam bentuk keterpaduan dengan berbagai jenis kecacatan untuk efisiensi sumber sarana yaitu Sekolah Dasar Luar Biasa. Sumber tertulis tentang bentuk kebijakan untuk mengakomodir wajib belajar bagi anak usia sekolah, khususnya anak-anak berkelainan juga terdapat pada sumber tertulis dari Sunardi sebagai berikut.

"Melihat kendala yang ada dalam upaya menyediakan layanan pendidikan bagi semua anak luar biasa, setelah meresmikan SLB Bagian Tuna Netra Pembina Tingkat Nasional di Jakarta pada tahun 1981, Presiden Suharto menginstruksikan pembangunan SLB baru di setiap kabupaten/kotamadya yang belum mempunyai SLB sama sekali. Terdapat 209 sekolah baru yang dibangun dengan dana Inpres tahun 1982-1984, terletak di 200 kabupaten/kotamadya yang belum mempunyai SLB sama sekali. Ada 209 sekolah baru yang dibangun dengan dana Inpres tahun 1982-1984, terletak di 200 kabupaten/kotamadya. Sekolah-sekolah ini akan menampung semua jenis kecacatan dan diberi nama Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB). Selanjutnya pada tahun 1984, juga dirintis integrasi anak tuna netra di sekolah biasa, meskipun secara informal, integrasi anak tuna netra di sekolah biasa sudah dilakukan jauh sebelum itu oleh sekolah-sekolah tertentu. Langkah ini diharapkan menunjang gerakan wajib belajar yang dicanangkan pada tahun 1984. Inilah awal munculnya pendidikan terpadu formal di Indonesia. (Sumber Sunardi, TT. *Kecenderungan dalam Pendidikan Luar Niasa*, halaman 104).

Jadi, pendidikan khusus dalam rangka merespon wajib belajar enam tahun mulai dengan pemerataan pendidikan dan memperluas cakupan layanan melalui pendidikan terpadu. Terpadu bukan hanya untuk tunanetra, tetapi semua anak berkebutuhan khusus yang tidak perlu sekolah khusus namun perlu pendidikan khusus. Mereka ini di antaranya anak berkemampuan unggul, anak-anak bermasalah belajar dan perilaku ringan. Mulai dari perluasan cakupan layanan inilah historis pendidikan khusus di Jawa dengan mulai memperhatikan dan mencari bentuk layanan

pendidikan kepada anak yang dipandang Supernormal dan Dysfungsi Minimal Otak (DMO). Pemerataan pendidikan dan cakupan layanan diusahakan dalam wacana pendidikan khusus pada waktu memasuki gerakan wajib belajar 6 tahun. Wacana itu dengan bentuk rintisan pendidikan terpadu, dan bentuk tersebut dimungkinkan bagi yang layanan kompensatoris dapat dilakukan di sekolah umum.

Gerakan perkembangan pendidikan khusus diilustrasikan dengan gambar sebagai berikut.



Gambar 1: Gerak Maju Sejarah Pendidikan Khusus

Salah satu contoh bentuk implementasi pendidikan terpadu di Jawa adalah sebagai berikut. Keberlangsungan pendidikan menurut Tilaar (2005: 110) di dalam habitus kemanusiaan. Saat pendidikan terpadu diimplementasikan di daerah Jawa perlu mempertimbangkan habitus kemanusiaan orang Indonesia khususnya masyarakat Jawa.

Untuk itu, pertimbangan dengan habitus itu berupa individu tunanetra yang dipandang sebagai sekelompok masyarakat yang minoritas menyesuaikan dengan kelompok mayoritas dengan berintegrasi. Hambatan dalam integrasi diatasi dengan bantuan dan bimbingan oleh Guru Pembimbing Khusus (GPK).

Hasil wawancara dengan salah satu mantan Guru Pembimbing Khusus, yaitu Bapak Drs. Achmad Nawawi. Sekarang salah satu pengajar UPI Bandung, pada tanggal 28 Juli 2010 sebagai berikut.

“Saya lahir di Salatiga tahun 1954, setelah lulus dari Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB) Yogyakarta melanjutkan ke IKIP Bandung, kalau tidak salah ingat tahun 1976. Pada tahun 1977 terjadi Penandatanganan kontrak kerja sama antara Helen Keller Internasional (HKI) dengan Departemen Pendidikan & Kebudayaan untuk rintisan pendidikan terpadu bagi tunanetra. Untuk itu, direkrut para lulusan SGPLB untuk ditatar menjadi Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang mendampingi para tunanetra yang berintegrasi ke sekolah umum. Mulai tahun 1977 sampai tahun 1979 mulailah penataran tersebut, termasuk saya sebagai angkatan kedua. Sejak itulah saya terpaksa mengambil cuti kuliah dua tahun dari PLB-FIP IKIP Bandung, karena saat penataran harus masuk jam delapan dan pulang jam empat sore. Sungguh harus intensif, saat itu pengajarnya termasuk almarhum Bapak Frans Harsono, waktu itu pendampingnya masih Bu Sari, serta dosennya juga bapak Mohammad Amin. Kemudian *counterpart* dari Amerika, di antaranya Mr. Dr. Burgoult; Ibu VW. Weusenfeld sebagai pendidikan terpadu, untuk Orientasi Mobilitas (OM) Mr. Thomas Blair, dan untuk *parent counseling* dibantu oleh Kirk Horton.

Perintisan pendidikan terpadu untuk tunanetra dimulai di empat kota, yaitu Bandung, Jakarta, Yogya, dan Surabaya. Di Bandung ada 2 angkatan, saya termasuk angkatan ke-2, kegiatannya full sehingga saya terpaksa cuti kuliah, penataran 4 bulan dihasilkan 33 orang Guru Pembimbing Khusus (GPK). Di Bandung diadakan penjaringan, penda-

taan anak-anak tunanetra yang berada di sekolah dasar, sekolah SMP mana kita data, langsung kita terjun ke sekolah-sekolah. Saat itu tenaga yang dari Amerika selalu mendampingi. Kita mendampingi dengan memberitahu kepada guru tentang kesesulitan dan kendala yang dihadapi anak ketika belajar, lalu kesulitannya kita tangani, bahan-bahan pelajaran kita transfer ke huruf Braille, jika waktu istirahat para guru dari sekolah umum beristirahat, kita tidak istirahat. Melainkan bersama anak-anak yang kita dampingi berputar-putar mengenali lingkungan. Sampai ada kejadian unik ada seorang anak yang ingin mengetahui tentang bentuk dari knalpot mobil, ia raba dan ia rogokkan tangannya ke bawah mobil, sampai tangannya kotor sampai siku bergelepotan hitam dari buangan oli. Jadi, guru selalu berusaha supaya kekurangan pengalaman di anak tunanetra kita intensifkan untuk mempelajarinya dengan cara menelusuri lingkungan, jika ada gambar yang anak tunanetra kesulitan membayangkan, kita ubah gambar tersebut dengan rader (alat yang digunakan penjahit ketika memberi batasan jahitan sesuai pola).”

Permulaan suatu kerja sama dengan lembaga internasional sebagai suatu usaha untuk pembaharuan di bidang pendidikan khusus. Pembaharuan memerlukan perjuangan yang intensif. Untuk itu, uji coba pendidikan terpadu juga diusahakan secara intensif. Intensitas itu ditunjukkan oleh usaha penataran bagi para calon pendamping (GPK) siswa tunanetra yang akan berintegrasi ke sekolah umum. Demikian juga saat mereka (GPK) terjun untuk praktik mendampingi siswa tunanetra para *counterpart* ikut mendampingi dalam praktik tersebut. Usaha yang dila-

kukan tersebut dikategorikan intensif atau bahkan memerlukan perjuangan keras, walaupun sebenarnya yang direkrut untuk GPK sudah merupakan lulusan SGPLB (sekolah guru khusus). Hal itu menunjukkan suatu pembahasan harus diusahakan secara berjuang dan intensif. Perjuangan diperlukan karena mengubah suatu sistem yang memisahkan bagi yang cacat untuk berintegrasi dengan yang normal. Integrasi dengan yang normal diperlukan juga kesadaran dari pihak komunitas sekolah untuk menerimanya. Tingkat penerimaan komunitas sekolah bervariasi, dan hal itu dapat dilihat dari ceritera perjuangan selanjutnya dari pelaku.

“Saat itu peran Guru Pembimbing Khusus (GPK) sangat luar biasa, GPK adalah segala-galanya. Peran untuk memberi informasi kepada guru tentang cara belajar anak, siswa kita siapkan dulu kemampuan Orientasi Mobilitas (OM) dan Braille, kita asesmen untuk penentuan pantasnya di kelas mana anak harus masuk. Saat itu pengalaman saya ada siswa yang sebenarnya pantas bertempat di kelas empat, tetapi kita diskusikan dengan guru-guru supaya tidak terburu-buru kita turunkan ditempatkan di kelas tiga, supaya lebih mudah dulu penyelesaian. Saya juga pernah berpengalaman bertugas di sekolah dasar yang dekat Panti Sosial dari DepSos di Cimahi, waktu itu karena dekat dengan panti saya kewalahan membimbing sembilan siswa. Ya repot sekali, karena standarnya itu tiap guru melayani lima siswa. Itu di tahun 1980 sampai dengan tahun 1982. Saya sebagai guru terpadu tahun 1980 sampai dengan 1988. Repotnya melayani 9 anak, karena setiap dia kesulitan pada buku matematika misalnya halaman berapa, “pak ini minta tolong dijelaskan buku matematika halaman 11,

lalu yang lain pak ini bahasa Indonesia saya kesulitan di halaman 25, Ilmu Pengetahuan Alam di bagian ini”. Jadi satu persatu mereka harus kita layani dan kita bimbing secara individual. Saat akan ada evaluasi Tes Hasil Belajar (THB) kita memberi tahu kepada guru kelas, bahwa pelaksanaan biasa saja, disamakan saja dengan siswa lainnya tidak perlu dibedakan. Hanya saja saya lalu kerja keras, karena kelas-kelasnya beda-beda harus mengetik soal dengan huruf Braille tanpa ada tambahan honorarium. Kalau ada gambar kita ubah dengan gambar berbintik-bintik memakai alat rader. Sehari-harinya GPK harus ada, untuk siap mengatasi segala kesulitan yang terjadi pada siswa ketika belajar. Bimbingan kita dapat masuk ranking lima besar, karena ketika anak yang lain istirahat, kita tidak istirahat berputar-putar sambil untuk meningkatkan Orientasi Mobilitas (OM), home visit juga berjalan. Jadi GPK segala-galanya, saya tidak dapat membayangkan ketika ada program inklusi yang di sekolah tanpa *helper*, ya pasti banyak kendala dan benturan.

Perjuangan pelaku pendidikan di bidang pendamping siswa tunanetra atau istilah saat itu GPK merupakan usaha yang keras. GPK saat itu harus mampu mengakomodir segala hambatan maupun kesulitan yang dialami oleh siswa tunanetra yang belajar bersama-sama dengan temannya yang awas. Bentuk akomodasi terhadap hambatan belajar ditunjukkan dengan mengubah segala bahan pelajaran yang dalam bentuk tulis untuk orang awas diubah dengan huruf Braille. Perubahan ke bentuk Braille itu tidak sama untuk semua siswa, GPK harus menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sis-

wa. Penyesuaian individual harus dilayani juga, karena siswa yang didampingi juga tingkatan kelas dan kemampuannya berbeda-beda.

Kompensatoris untuk mengatasi kelemahan pengalaman anak tunanetra dilakukan juga saat guru-guru yang lain sedang beristirahat. Tunanetra dengan kehilangan indera penglihatan akan terjadi kehilangan 80% pengalaman manusia. Untuk itu, GPK mengkompensasi kehilangan itu dengan mengajak siswa tunanetra jalan berputar-putar untuk mengeksplorasi lingkungan sekolah. Siswa dipersilahkan sendiri untuk mencoba meraba segala hal yang ingin diketahui sepanjang tidak membahayakan anak, seperti seorang anak tunanetra tangannya bergelepotan oli karena meraba knalpot mobil.

Kompensatoris yang lain dilakukan oleh GPK, yaitu supaya mempermudah tunanetra membayangkan suatu gambar, garis atau lingkaran gambar diubah dengan tonjolan alat rader. GPK harus mengeluarkan kemampuan kreativitas dan hati yang peduli terhadap kesulitan-kesulitan yang dialami anak tunanetra. Kesulitan harus dikompensasi dengan berbagai usaha agar mempermudah. Di samping itu memberi kesempatan siswa tunanetra untuk menimba pengalaman di sekitar lingkungan sekolah. Cara ini akan memperkaya pengalaman siswa tunanetra yang banyak tertinggal karena hambatan visualnya. Demikian juga usaha GPK agar siswa tunanetra mampu menempuh ujian akhir yang standarnya sama dengan anak awas juga diusahakan. Ternyata prestasi tunanetra dengan bantuan in-

tensif GPK dapat masuk lima besar ranking atas.

Gerakan wajib belajar berimplikasi pada perluasan cakupan layanan pendidikan khusus. Perluasan itu terletak pada fokus pelayanan tidak hanya bagi anak-anak yang cacat *observable* dan permanen, tetapi perlu perluasan kepada anak-anak yang memerlukan pendidikan khusus dengan hambatan yang tidak *observable*. Mereka di antaranya anak-anak bermasalah belajar dan masalah perilaku ringan. Walaupun dari segi kepastian hukum belum mengaturnya, namun persoalan anak-anak yang bermasalah belajar dan masalah perilaku harus mendapat layanan pendidikan yang sesuai. Pendidikan bagi mereka tidak dalam bentuk lembaga sekolah khusus, melainkan pendidikan khusus di sekolah umum. Hal itu dapat ditunjukkan dari pemikiran Sunardi dalam tulisan yang menjadi sumber dari implikasi wajib belajar sebagai berikut.

“... Meskipun ada upaya untuk menjadikan SD menjadi SD Terpadu, usaha ini masih bersifat ujicoba, tanpa adanya kepastian hukum. Ini terlihat dengan diundangkannya PP Nomor 72 Tahun 1991 tentang PLB. Sebagian besar PP tersebut hanya membahas penyelenggaraan sekolah khusus. Tidak ada satu pasalpun yang menyinggung tentang pendidikan terpadu.

Dalam perjalannya, sistem segregasi ini ternyata belum mampu menyediakan layanan pendidikan bagi semua anak luar biasa yang ada. Ada berbagai hambatan dengan sistem ini, seperti faktor geografis, sosial-ekonomi orang tua, kemampuan keuangan negara, atau sikap terhadap anak luar biasa seperti

yang telah diuraikan sebelumnya. Berdasarkan angka estimasi jumlah anak luar biasa menurut Depsos sebesar 3% dari jumlah semua anak saja, belum ada 4% dari jumlah anak luar biasa yang memperoleh kesempatan bersekolah. Padahal, estimasi Depsos lebih berdasarkan pada kebutuhan sosial dan hanya meliputi jenis kecacatan yang *observable* seperti cacat netra, cacat rungu-wicara, cacat mental, cacat fisik, dan cacat laras. Ada estimasi yang lebih tepat untuk tujuan pendidikan, yaitu estimasi yang dipakai oleh PBB sebesar 10%. Estimasi ini telah memasukkan kategori **bermasalah belajar dan perilaku ringan**, jenis kelainan yang tidak begitu tampak, tetapi justru merupakan mayoritas dari anak yang memerlukan layanan pendidikan khusus.

Untuk dapat menjangkau semua anak luar biasa, diperlukan satu sistem pendidikan yang lebih integratif. Dengan sistem yang lebih integratif, akan dimungkinkan penyediaan layanan pendidikan khusus di sekolah-sekolah biasa. Namun demikian, tidak berarti bahwa semua anak luar biasa akan dididik di sekolah biasa seperti yang dimaksud dengan konsep *inclusion* dan ditutupnya sekolah-sekolah khusus yang ada. Konsep ini belum pas diterapkan di Indonesia. Yang diperlukan adalah berbagai alternatif penempatan seperti pada konsep *mainstreaming*. Sekolah khusus disediakan bagi anak-anak yang memang tidak mungkin berada di sekolah biasa karena jenis dan tingkat kecacatannya. Di sekolah biasa harus tersedia berbagai fasilitas yang memungkinkan anak luar biasa memperoleh layanan pendidikan yang layak.

Untuk merealisasikan gagasan ini, harus ada berbagai perubahan atas sistem yang ada, dan perubahan yang paling mendesak adalah pada sistem belajar mengajar di sekolah biasa. Kelas biasa harus memungkinkan penanganan anak yang heterogen di tempat yang sama. Untuk itu, para guru kelas harus diberi bekal pengetahuan dan keterampilan dasar menangani kelas yang heterogen. Guru PLB juga diperlukan di sekolah biasa, bekerjasama dengan para guru kelas menangani anak yang memerlukan layanan khusus (Sunardi, *Kecenderungan dalam Pendidikan Luar Biasa*, halaman 114-115).

Perubahan untuk mejuju kepada kualitas layanan dalam pendidikan khusus adalah perlunya kemampuan guru menangani anak-anak yang heterogen di kelas biasa. Implikasi itu diperlukan suatu kecenderungan dalam operasional pendidikan di sekolah dengan seorang guru yang memiliki filosofi yang humanistik dan mampu melakukan pembelajaran yang progresif. Hal itu dikemukakan dalam penelitian Wrigley (2006:127) tentang pengalaman dan representasi simbolik yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mencari manfaat model pendidikan yang progressif dan inklusif. Model ini secara langsung memberi pengalaman belajar, selanjutnya pengalaman itu di-konversi menjadi simbolik untuk menjadi bangunan kognitif siswa. Proses itu dapat terjadi pada siswa jika dalam pembelajaran di kelas digunakan pendekatan progressif dan inklusif. Pendekatan itu dipandang sesuai untuk model proses pengalaman dan representasi simbolik karena siswa diberi ke-

sempatan untuk maju membangun pengetahuannya di dalam suasana variasi kelas inklusif yang multimodalitas dan multilevel. Penelitian itu menunjukkan bahwa variasi kelas justru sebagai modal sumber daya pengalaman belajar yang mendorong siswa saling belajar membangun kognitif mereka.

Tuntutan kemampuan guru yang mampu melakukan penanganan kelas yang heterogen merupakan persoalan yang kompleks. Persoalan itu memerlukan suatu perubahan sistem dalam materi yang diberikan pada pendidikan calon guru. Sebenarnya pada anak-anak yang dipandang normal juga heterogen. Misalnya, kecenderungan untuk mengakomodasi kecerdasan ganda adalah di antara kemampuan guru memandang heterogen di antara anak normal. Untuk itu, kemampuan guru melakukan pembelajaran yang inklusif sebenarnya juga mengakomodasi kecerdasan ganda yang terdapat pada anak-anak pada umumnya.

Kecenderungan perubahan di bidang pendidikan khusus yang menuju inklusif dipengaruhi juga oleh berbagai pandangan di dalam ilmu sosial maupun ilmu pendidikan pada umumnya. Di bidang ilmu sosial dipengaruhi oleh pandangan postmodern dan studi kultural, dan hal itu berkaitan juga berkembangnya filsafat eksistensialisme dan pragmatisme yang mengarah pada lahirnya teori pendidikan humanisme dan progressivisme. Pandangan postmodern dan studi kultural yang menghargai akan sumber-sumber keunikan yang luar biasa, demikian juga filsafat eksistensialisme yang menurut Knight (1982:69) *'does not seek for such thing as*

purpose in universe. Only man, the individual, has purpose' berimplikasi lebih berorientasi kepada peserta-didik yang dipandang unik dan dihargai akan potensinya. Demikian juga, pengaruh pandangan filsafat pragmatisme bahwa kehidupan manusia itu tidak pasti, dan selalu menciptakan konsep dan selalu mencari dengan eksperimen di dalam praktik. Berbagai pandangan itu semuanya mendukung untuk menghargai keunikan individu, dan untuk membuktikan harus diberi kesempatan yang nyata untuk berkembang dan berbuat. Konsep tersebut juga memberi pengaruh terhadap perubahan pandangan di bidang pendidikan khusus.

Perubahan yang berorientasi filsafat tradisional dengan memperlakukan penyandang cacat/berkebutuhan khusus harus menyesuaikan dengan budaya yang mayoritas/*mainstreaming* berubah kepada pandangan yang berpusat pada peserta-didik untuk bebas dan merdeka berkembang di lingkungan yang sama dengan yang normal. Untuk itu, setelah gerakan wajib belajar 6 tahun pandangan pendidikan khusus di wilayah Jawa berubah menuju pandangan yang rekonstruksionisme, yaitu mengutamakan peranan sekolah secara signifikan untuk kritisisme budaya dan perubahan. Perubahan itu dapat berlangsung di wilayah Jawa, jika saat terjadi perubahan ada komunikasi untuk saling memahami dan terbina suasana harmoni. Lihat saat pengalaman GPK di sekolah terpadu tunanetra, kelancaran program terpadu jika antara orang-orang yang di sekolah umum memahami, dan pemahaman itu karena ada saling komunikasi antara Guru Pembimbing Khusus

(GPK) dan guru umum. Fenomena itu dapat dimaknai bahwa perubahan terjadi di kondisi yang harmoni, dan implikasi makna filosofis-edukatif adalah berjalan menuju tetap berpegang pada yang lama dengan disesuaikan kondisi perubahan.

Makna filosofis-edukatif yang dapat direfleksikan bahwa perubahan di bidang pendidikan khusus diperlukan oleh lembaga pendidikan khusus dengan berorientasi ke pandangan mengikuti perubahan yang selalu terjadi di masyarakat. Perubahan itu dengan memberi kesempatan yang bebas, merdeka, akomodatif, kesempatan yang seluas-luasnya bagi peserta-didik berkebutuhan khusus untuk mengalami sendiri perubahan. Tujuan yang diarahkan kepada peserta-didik berkebutuhan khusus adalah mencapai hidup harmoni di alam yang selalu cepat berubah. Untuk itu, kaidah atau nilai budaya masa lalu tetap dipegang dan di konformitaskan dengan perubahan maupun kondisi keterbatasan yang dimiliki. Semua peserta didik berkebutuhan khusus memiliki potensi yang unik dan dapat berkembang jika diberi kesempatan dan sadar akan konformitas.

Rintisan terpadu bagi tunanetra di wilayah Jawa diasumsikan berhasil, karena masyarakat Jawa juga memiliki fleksibilitas dalam menerima perubahan. Pendidikan terpadu adalah sebuah perubahan dalam rangka perubahan ke bentuk inklusif. Pendidikan terpadu adalah jalan setapak menuju inklusif, karena terpadu dengan cara penyandang berkebutuhan khusus menggunakan semua kurikulum sekolah umum dan juga suasana dan kondisi kelas umum.

Perubahan inklusif yang radikal dengan cara kurikulum menyesuaikan dengan kondisi masing-masing anak akan banyak mengalami respon penolakan. Untuk itu, perlu diujicobakan yang moderat dengan cara peserta-didik berkebutuhan khusus yang menyesuaikan dengan kurikulum yang umum dan terstandar.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, refleksi historis pendidikan khusus di Jawa ini disimpulkan sebagai berikut. Pada masa akan memasuki gerakan wajib belajar enam tahun pendidikan khusus perlu memperluas cakupan layanan dan pemerataan pendidikan. Cakupan layanan dengan mempertimbangkan anak-anak yang cacat atau berkebutuhan khusus yang program kompensatorisnya dapat diakomodir di sekolah umum. Bentuk perluasan tersebut dengan implementasi pendidikan terpadu bagi tunanetra di wilayah Jawa, pengembangan program pendidikan khusus untuk anak supernormal di Jawa, dan mulainya perhatian terhadap anak-anak Disfungsi Minimal Otak (DMO) atau bekesulitan belajar. Bentuk terpadu untuk mengatasi kelemahan bentuk sekolah khusus terpisah, yaitu kelemahan keterbatasan berkembang bagi anak yang cacat atau memiliki berkebutuhan khusus. Bentuk sekolah terpadu merupakan langkah awal pendidikan khusus ke arah rintisan pendidikan inklusif. Perubahan pendidikan khusus mulai bentuk eksklusif menuju inklusif secara filosofis-edukatif adalah perubahan yang berorientasi menuju pandangan humanis-

me. Falsafah-edukatif yang mendasari perubahan pendidikan khusus masa sekarang dan di masa yang akan datang adalah falsafah yang cenderung berakar dari filosofi pragmatisme-eksistensialisme dan humanisme.

UCAPAN TERIMA KASIH

Selesainya Disertasi ini berkat bimbingan dua promotor saya. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Achmad Dardiri, M Hum dan Prof. Dr. Djoko Suryo yang telah memberikan arahan sehingga Disertasi ini terwujud. Selanjutnya, kepada tim Redaktur *Cakrawala Pendidikan* dan Mitra Bestari dalam pemberian kesempatan dan penyempurnaan artikel dapat dimuat di Edisi Khusus Dies Universitas Negeri Yogyakarta di tahun 2012, nara-sumber personal tentang Pendidikan Terpadu di tahun 1972, maupun para kontributor yang pemikirannya saya gunakan sebagai acuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barnadib, Imam. 1982. *Arti dan Metode Sejarah Pendidikan*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Yogyakarta.
- _____. 2002. *Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta: Adicita.
- Budiyanto. 2006. "Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Pendidikan Lokal: Studi Pengembangan Model Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar di Kota Surabaya". *Disertasi Doktor*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Cassirer, E. 1990. *Manusia dan Kebudayaan: Sebuah Esai tentang Manusia*. (Di Indonesiakan oleh Alois A. Nugroho). Jakarta: Penerbit PT Gramedia. (Buku asli diterbitkan tahun 1944).
- Gutek, G. L. 1974. *Philosophical Alternatives in Education*. Ohio: Merrill Publishing Company.
- Hallahan. D. P. & Kauffman. J. M. 2003. *Exceptional Learners: Introduction to special education*. 9th. Boston: Allyn and Bacon.
- Knight. G.R. 1982. *Issue and Alternatives in Educational Philosophy*. Michigan: Andrews University Press.
- Sjamsudin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Om-bak.
- Tilaar, H.A.R. 2005. "Manifesto Pendidikan Nasional, Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural", *Kompas*.